

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MANAJEMEN KONFLIK DI DISTRIK SUGAPA KABUPATEN INTAN JAYA

Iga Putra Amalo ¹⁾, Nur Aedah ²⁾

¹⁾ Mahasiswa Pascasarjana Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

²⁾ Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

Abstract :

The purpose of this study is to accelerate poverty alleviation and provide opportunities for the community to be able to open their own jobs so that they can develop development and empower communities in the village to develop and not be left behind. Types of Descriptive-Qualitative Research, Data were collected using techniques in the form of observation, documentation and developed by interviewing the informants. The data was analyzed descriptively qualitatively, namely analyzing all the data that the author had collected, both primary data and secondary data and then presented in the form of informants obtained from interviews and interview guidelines. From the results of the study it was found that the implementation of community empowerment program policies in conflict management in the Sugapa district of Intan Jaya district were: (a) communication in the socialization of the Community Empowerment Program (PRODAMAS) was also still not going well. (b) Resources in the realization of Prodamas funds in each RT are still focused on development (c) There are still some dispositions that have not carried out citizen consultations (d) the bureaucratic structure is good, where technical instructions in the implementation of community empowerment programs have gone well.

Abstrak :

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri sehingga dapat mengembangkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa semakin berkembang dan tidak mengalami ketertinggalan lagi. Jenis Penelitian Deskriptif-Kualitatif, Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, dokumentasi serta dikembangkan dengan wawancara kepada Informan. Data tersebut di analisis secara Deskriptif Kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, baik data primer maupun data sekunder dan selanjutnya disajikan dalam bentuk Informan yang diperoleh dari hasil wawancara dan Pedoman Wawancara. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi kebijakan program pemberdayaan masyarakat dalam manajemen konflik di distrik sugapa kabupaten intan Jaya adalah: (a) komunikasi dalam sosialisasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) juga masih belum berjalan dengan baik. (b) Sumber daya dalam realisasi dana Prodamas di tiap RT masih terfokus pada pembangunan (c) Disposisi masih ada beberapa belum melaksanakan rembung warga (d) struktur birokrasi sudah baik, dimana petunjuk teknis dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat telah berjalan dengan baik.

Keyword: *Policy Implementation, Program, Community Empowerment, Conflict management, Sugapa District, Intan Jaya Regency*

PENDAHULUAN

Menurut George C. Edward III (dalam Agutino, 2008; Nugroho, 2009; Winarno, 2012), implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling

berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan

bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu: Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan? Kemudian, Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan menurut Edward III (dalam Widodo, 2011) yaitu faktor komunikasi (*communication*), sumber Daya (*resources*), disposisi (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)

Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial (Rahayu, 2008). Konsep pemberdayaan selalu dihubungkan dengan kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dimana pemberdayaan masyarakat merupakan sarat utama yang akan membawa masyarakat menuju kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dinamis (Hikmat, 2010).

Sumodiningrat dalam Mardikanto & Soebiato (2019) Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan memfasilitasi kelompok miskin agar mereka dapat memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya, yang berupa Modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran dan lain-lain. Sehingga mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga dapat memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi untuk perbaikan dalam kehidupan dan kesejahteraannya.

Pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*) dan terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian (Sulistiyani, 2004).

Dalam pemberdayaan perlu dipikirkan siapa saja yang akan menjadi sasaran pemberdayaan. Sasaran pemberdayaan yang dimaksud yaitu siapa yang akan menjadi kelompok atau masyarakat yang akan di berdayakan, menurut Schumacer dalam Sulistiyani (2004) memiliki pandangan pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin dengan tidak harus menghilangkan ketimpangan struktural terlebih dahulu. Masyarakat miskin sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun. Disamping itu NGO (*Non-Governmental Organization*) merupakan agen yang memiliki posisi penting, karena dipandang lebih bersifat wiraswasta, berpengalaman dan lebih inovatif dibanding pemerintah. Pemaknaan pemberdayaan selanjutnya seiring dengan konsep *good governance*. Konsep ini mengetengahkan tiga pilar yang harus dipertemukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat yang hendaknya menjalin kemitraan yang selaras.

Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial masyarakat yang rendah mengakibatkan masyarakat konflik, masalah konflik merupakan fenomena yang tidak asing lagi dan menyita perhatian publik karena wujudnya yang sebagian besar telah mengarah pada suatu kekerasan sosial dan telah meluas pada berbagai lapisan masyarakat (Nugroho, dkk, 2013; Nurcholis, 2011).

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam

(a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*). dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suhartini: 2005).

Pemberdayaan masyarakat kini telah menjadi agenda penting pemerintah terutama sebagai kelanjutan dari kegagalan konsep pembangunan masa lalu. Tidak hanya pemerintah tapi dunia usaha juga memiliki program pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat. Namun hal ini seringkali bertentangan dengan kenyataan dilapangan. Program pemberdayaan kurang mengena sasaran, karena sering dilakukan secara *charity*, ditambah lagi program pemberdayaan malah menguras dan “memperdayai” rakyat. Sehingga praktek korupsi semakin merajarela yang kaya semakin berkuasa dan yang miskin semakin tidak berdaya (Mustangin, dkk, 2017).

Sebelum pemerintah mencanangkan program pemberdayaan masyarakat pedesaan, di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya terdapat banyak persoalan dalam hal kemiskinan dan pengangguran, akibatnya terjadi konflik sosial antar marga dengan marga sering terjadi, tidak ada lapangan kerja dan suatu persoalan kecil saja banyak orang yang kumpul untuk menyelesaikan maupun memupukkan masalah akhirnya terjadi konflik antara masyarakat. Di Distrik Sugapa terdapat berapa Kampung yaitu: Enam belas kampung tertinggal, Yokatapa, Wandoga, Bilogai, Mamba, Yoparu, Egnemba, Titigi, Jalai, Puyagia, Mindau, Emondi, Degeabu, Mbilundoga, Kumbalagupa, Ndugusiga, Ugimba.

Implementasi program pemberdayaan masyarakat dapat dijelaskan secara umum adalah suatu proses yang terlaksana dengan baik dari kabupaten tersebut. Namun dari program pemberdayaan masyarakat tersebut tidak akan terlepas dengan adanya program pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan. Tujuan dari program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat agar dapat mendorong percepatan terlaksananya kegiatan pelatihan program pemberdayaan masyarakat dalam mencegah terjadinya konflik melalui program pemberdayaan masyarakat di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya.

Dari penggambaran di atas, program penguatan daerah mendapatkan aset dari aset kota untuk mempersiapkan program untuk memberdayakan mereka yang tidak berdaya dan individu yang didelegasikan miskin. Aset tersebut digunakan untuk program penguatan wilayah lokal sepenuhnya. Meski demikian, setelah program penguatan daerah dilaksanakan, masih banyak masyarakat yang belum sejahtera. Kekecewaan terhadap sistem penguatan daerah dapat diperkirakan dari derajat capaian program penguatan daerah. Penting untuk mengarahkan penilaian program untuk membuat program bermanfaat secara lokal. Olehnya penelitian ini berfokus untuk menyoroti implementasi program pemberdayaan masyarakat dalam rangka sebagai upaya manajemen konflik di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya.

METODE PENELITIAN

Adapun tipe penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian adalah Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Manajemen Konflik Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya, Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Manajemen Konflik Distrik Sugapa

Kabupaten Intan Jaya. Lokasi dalam penelitian ini adalah bertempat di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Intan Jaya, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Intan Jaya, Kepala Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya, Kepala Kampung Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya.

Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013; Moleong, 2001; Arikunto, 2002; Bungin 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Komunikasi

Dalam pelaksanaan sosialisasi kegiatan Prodamas, Ketua RT, RW dan LPMK dilibatkan secara aktif sebagai bagian dari Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kelurahan mengingat kedudukan mereka yang sangat vital yaitu sebagai representasi masyarakat secara langsung.

Data dokumentasi dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) ada 4 tahapan yaitu *Pertama*, tahap perencanaan adalah tahap awal yang disusun oleh masing-masing RT yang ada di Distrik Sugapa dengan cara melakukan rebug warga; *Kedua*, tahap pencairan anggaran adalah tahap kedua setelah usulan-usulan di tingkat RT telah disetujui oleh pelaksana kegiatan; *Ketiga*, tahap pelaksanaan kegiatan adalah tahap mengimplementasikan usulan warga ditingkat RT yang meliputi bidang infrastruktur, ekonomi dan sosial; dan *Keempat*, tahap penyerahan hasil pekerjaan yaitu tahap akhir setelah apa yang diusulkan warga telah diproses dan dilaksanakan.

Sumber Daya

Pengelolaan dana Prodamas ini di kelola oleh Kelurahan karena masih belum berani mengambil resiko dalam pengelolaan dananya, akibatnya serahkan kepada petugas Kelurahan Mengenai tugas Ketua RT waktu itu hanya menerima barang yang sudah kita usulkan. Dan juga yang terpenting bisa memastikan apa yang telah warga usulkan.

Sumber daya dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) ditingkat RT sebenarnya bisa, asalkan mampu untuk mengelola dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi nyatanya pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) dikelola oleh pihak Kelurahan, sedangkan Ketua RT dan warganya hanya mengusulkan dan menerima saja.

Disposisi

Dalam implementasi kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) sikap pendamping merupakan salah satu faktor utama. Sebagai program yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh masyarakat tentunya tidak menutup kemungkinan akan adanya permasalahan-permasalahan dalam prosesnya, mengingat bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap Prodamas itu sendiri sangatlah majemuk. Selain itu mereka harus mengikuti kegiatan Sikap Karakter (*Character Building*) dimana pada kegiatan para pendamping dibekali pengetahuan dan ilmu tentang bagaimana cara menghadapi masyarakat yang majemuk. Kedua macam kegiatan diatas dilakukan sebelum para pembimbing diterjunkan ke tengah masyarakat untuk menjalankan tugasnya sehingga saat mulai bertugas mereka akan siap dan melayani masyarakat dengan segala kompleksitas permasalahan didalamnya.

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi dari pelaksana Prodamas di Distrik Sugapa sangat sederhana sekali, keanggotaanya juga

terbatas. Hal tersebut diatur dalam petunjuk teknis operasional yang menjadi ukuran dasar dari prosedur kerja (SOP) yaitu salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi dalam menjalankan Program Pemberdayaan Masyarakat.

SOP dan kebijakan-kebijakan lainnya dari pengelola kegiatan baik, karena pengelola dapat mengerti dan memahami secara berangsur-angsur isi dan tujuan dari juknis tersebut. Hal ini disebabkan karena pada sebelumnya mereka juga pernah mengelola Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Provinsi yang juknisnya juga tidak jauh berbeda.

Faktor Pendukung dan Penghambat Internal

Faktor ketidakmampuan adaptasi yang menimbulkan konflik yaitu adanya hambatan yang bersifat ideologis, hambatan ini biasanya terjadi pada adanya usaha-usaha untuk merubah unsur-unsur kebudayaan rohaniah. Karena akan diartikan sebagai usaha yang bertentangan dengan ideologi masyarakat yang telah menjadi dasar yang kokoh bagi masyarakat tersebut. Adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru, anggapan seperti ini biasanya terjadi pada masyarakat yang pernah mengalami hal yang pahit dari suatu masyarakat yang lain. Faktor ketidakpekaan dan emosi yang labil yaitu kikap masyarakat yang tradisional, adanya suatu sikap yang membanggakan dan memperthankan tradisitradisi lama dari suatu masyarakat akan berpengaruh pada terjadinya proses perubahan. Karena adanya anggapan bahwa perubahan yang akan terjadi belum tentu lebih baik dari yang sudah ada.

Eksternal

Faktor pendidikan (keluarga, rumah, dan sekolah), terlambatnya pendidikan dalam ilmu pengetahuan dapat diakibatkan karena suatu masyarakat tersebut hidup dalam keterasingan dan dapat pula karena ditindas oleh masyarakat lain. Organisasi sosial yang telah mengenal

sistem lapisan dapat dipastikan akan ada sekelompok individu yang memanfaatkan kedudukan dalam proses perubahan tersebut. Contoh, dalam masyarakat feodal dan juga pada masyarakat yang sedang mengalami transisi. Pada masyarakat yang mengalami transisi, tentunya ada golongan-golongan dalam masyarakat yang dianggap sebagai pelopor proses transisi. Faktor kelompok masyarakat, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Hal ini biasanya terjadi dalam suatu masyarakat yang kehidupannya terasing, yang membawa akibat suatu masyarakat tidak akan mengetahui terjadinya perkembangan-perkembangan yang ada pada masyarakat yang lainnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran dalam hasil pembahasan pada bagian sebelumnya tentang Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Manajemen Konflik Di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya maka dapat disimpulkan bahwa :

Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Distrik Sugapa secara umum sudah berjalan dengan baik. Komunikasi dalam sosialisasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) juga masih belum berjalan dengan baik, seperti yang terjadi di beberapa RT. Sumber Daya dalam realisasi dana Prodamas di tiap RT masih terfokus pada pembangunan berskala kecil dan pengadaan alat kelengkapan di masing-masing lingkungan RT. Namun dalam Disposisi masih ada beberapa belum melaksanakan rembug warga, atau keputusan diputuskan secara pribadi. Dilihat dari indikator Struktur Birokrasi sudah baik, dimana petunjuk teknis dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat telah berjalan dengan baik.

Disamping itu terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam konflik di Distrik Sugapa. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kemiskinan merupakan awal terjadinya konflik sosial yang berada

di Distrik Sugapa disamping faktor lain yang mempengaruhinya bahwa hal-hal tersebut dikuatkan oleh para pelaku yang menunjukkan bahwa kemiskinan yang membawa mereka pada jalur konflik sosial yaitu dalam lingkup kriminalitas. Konflik di Distrik Sugapa berdampak kemiskinan merupakan awal terjadinya konflik sosial yang berada di Distrik Sugapa disamping faktor lain yang mempengaruhinya. Kemiskinan itu berdasarkan kultural bisa melahirkan konflik dalam bentuk perang suku antar kampung satu dengan lainnya. Adapun hal-hal tersebut dikuatkan oleh para pelaku yang menunjukkan bahwa kemiskinan yang membawa mereka pada jalur konflik sosial yaitu dalam lingkup kriminalitas.

Rekomendasi

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah dalam mengimplementasikan kebijakan program pemberdayaan masyarakat di Distrik Sugapa sebaiknya dilakukan secara merata di setiap kampung dengan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara komunal agar semua elemen dan bagian dari masyarakat merasakan dampak dari adanya program pembangunan sebagai manifestasi implementasi kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah yang berbasis pada pemberdayaan komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian. Suatu pendekatan praktek*. Jakarta: rineka cipta.
- Bungin, B. (2009). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana.
- Hikmat, H. (2010). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta, Deepublish.
- Moloeng, J. L. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, D. A., Soeaidy, M. S., & Hadi, M. (2013). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(5), 862.
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy Edisi Revisi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Rahayu, A. B. (2008). *Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Iskandar institute, Jakarta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartini, R. (2005). *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumardjo. 1999. *Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian*. Bogor : Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Widodo, J. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia. Malang.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik, (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*. Yogyakarta.CAPS